

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan/kondisi ketidakmampuan individu/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan (Sunarti 2006). Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu SDM yang kurang memadai, kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Karena masyarakat miskin cenderung memiliki pendidikan yang sangat rendah, sehingga tidak mampu bersaing yang pada akhirnya menjadi pengangguran.

Kemiskinan merupakan penyebab utama kerawanan pangan. Gambaran kemiskinan salah satunya dapat dilihat dari kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan.

Tingkat kemiskinan rumah tangga dapat digambarkan dengan pendapatan dan pola pengeluarannya. Pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli juga rendah sehingga rumah tangga miskin melakukan pilihan dalam membelanjakan

pendapatannya bahkan mungkin harus meniadakan beberapa kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu.

Kriteria keluarga miskin menurut BPS menggunakan pendekatan basic needs (dasar keinginan), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Batas kecukupan pangan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kalori perkapita perhari. Batas kecukupan non makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk non makanan yang memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dll. adapun kriteria menurut BPS, ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga/rumah tangga miskin, yaitu :

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan hanya satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu) per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga : tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), seperti sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Penyediaan pangan terutama beras dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau tetap merupakan prioritas utama pembangunan, oleh karena itu pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam hal ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Adapun program-program nya sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Menurut Program dan Kecamatan Di**  
**Kota Bandung 2017**

Kecamatan	Jumlah Keluarga Penerima Bantuan			
	PKH	KKS	PBDT	PBI
Bandung Kulon	2983	4785	8344	27718
Babakan Ciparay	2665	5528	9811	32045
Bojongloa Kaler	2233	5569	11405	33712
Bojongloa Kidul	2322	3137	6031	17582
Astanaanyar	975	1639	3823	11348
R e g o l	944	1859	4264	11581
Lengkong	817	1221	2658	6617
Bandung Kidul	1164	1726	3857	10262
Buah Batu	1318	2157	5653	12849
Rancasari	888	1380	3138	5996
Gedebage	619	798	1936	3595
Cibiru	1744	2378	4491	15496
Panyileukan	350	588	1651	3594
Ujungberung	2057	2932	5564	17760
Cinambo	400	633	1560	3300
Arcamanik	1197	1722	3887	8715
Antapani	747	1095	2785	6100
Mandalajati	1201	1835	3853	10949
Kiaracondong	1953	3603	8589	23326
Batununggal	2045	3269	8672	21594
Sumur Bandung	227	408	1046	2920
A n d i r	1530	2639	5452	17324
Cicendo	1270	2053	3968	12633
Bandung Wetan	253	356	1044	3264
Cibeunying Kidul	1261	2311	6094	13511
Cibeunying Kaler	636	1102	2924	6502
Coblong	1227	2211	6265	15042
Sukajadi	1595	2398	5469	13944
Sukasari	618	1000	2596	6859
Cidadap	616	930	1903	5922
<b>JUMLAH</b>	<b>37855</b>	<b>63262</b>	<b>138733</b>	<b>382060</b>

Sumber : *Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung*

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara. Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif, dan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Program BPNT ini dapat mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Skema Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain-lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu.

Program BPNT merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam perubahan pola pengeluaran rumah tangga yaitu dengan peningkatan konsumsi pangan maupun non pangan rumah tangga.

Program BPNT ini diasumsikan akan dapat mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga. Penyaluran kebutuhan pangan bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga penerima bantuan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Kota Bandung merupakan sebuah kota besar sekaligus sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat dan sebagai kota metropolitan Kota Bandung tak lepas dari masalah kemiskinan. Bisa kita lihat data kemiskinan di Kota Bandung.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2014-2017**

TAHUN	Jml Penduduk Miskin (Dlm 000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2014	115.00	4.65	0.69	0.17	353,423
2015	114.12	4.61	0.72	0.19	376,311
2016	107.58	4.32	0.55	0.12	400,541
2017	103.98	4.17	0.68	0.18	420,579

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Dapat dilihat dari tabel 1.2 selama kurun waktu 4 tahun jumlah penduduk miskin di Kota Bandung pada Tahun 2017 mencapai 103.98 ribu jiwa, dengan tingkat kemiskinan yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada Tahun 2014 mencapai 115.00 ribu jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada Tahun 2017 mencapai 103.98 ribu jiwa. Kemiskinan di Kota Bandung tersebut dapat pula di proyeksikan dari kemiskinan wilayah nya, termasuk juga kemiskinan di wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler. hal itu dapat di lihat dari data tabel 1.3, mengenai jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tingkat 1 di Kecamatan Bojongloa Kaler sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Jumlah KK dan Jiwa Menurut Tahapan KS Per Kelurahan di Kecamatan Bojongloa Kaler Tahun 2014 & 2016**

Kelurahan	Tahun 2014				Tahun 2016			
	Pra KS		KS I		Pra KS		KS I	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Kopo	277	1080	796	3025	702	-	2771	-
Suka Asih	844	3207	458	1740	374	-	1927	-
Babakan Asih	389	1478	1468	5578	246	-	1789	-
Babakan Tarogong	1085	4123	1169	4442	225	-	3169	-
Jamika	301	1144	367	1395	238	-	1837	-
<b>Jumlah</b>	<b>2896</b>	<b>11032</b>	<b>8903</b>	<b>16180</b>	<b>1785</b>		<b>11.493</b>	

Sumber : Kecamatan Bojongloa Kaler Dalam Angka 2017

Data Tabel 1.3. tersebut menunjukkan jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 di Kecamatan Bojongloa Kaler terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Kecamatan Bojongloa Kaler masih cukup tinggi tetapi menurun di setiap tahunnya. Masih banyak masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler yang menerima program bantuan dari pemerintah ada 5569 Keluarga untuk yang

mempunyai KKS dibandingkan dengan Kecamatan lainnya Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan Kecamatan tertinggi penerima program bantuan dari pemerintah. Untuk itulah peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi saat ini, dan mencoba mengangkat fenomena tersebut serta menguraikannya ke dalam bentuk penelitian Skripsi yang berjudul *“Analisis Korelasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Miskin”, Studi Kasus Pada Masyarakat Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Bojongloa Kaler.*

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian tersebut maka, rumusan masalah mengenai Analisis Korelasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat korelasi antara bantuan pangan non tunai (BPNT) dengan pengeluaran konsumsi (pangan dan non pangan) ?
2. Apakah terdapat korelasi antara bantuan pangan non tunai (BPNT) dengan pengeluaran konsumsi pangan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui korelasi antara dengan bantuan pangan non tunai (BPNT) dengan pengeluaran konsumsi (pangan dan non pangan).

2. Untuk mengetahui korelasi antara bantuan pangan non tunai (BPNT) dengan pengeluaran konsumsi pangan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis**

Kegunaan penelitian ini, berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut :

Searah dengan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa tambahan sumber informasi dan sumber referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, khususnya mengenai Dampak dari program bantuan pangan non tunai yang di berikan oleh Pemerintah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin melalui peningkatan gizi, terutama bila di lihat dari aspek pengeluaran konsumsi untuk pangan oleh rumah tangga miskin di lingkup Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris berupa :

- 1) Melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan.
- 2) Sebagai salah satu media latihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari.

- 3) Sebagai acuan bagi mahasiswa dan referensi perpustakaan yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan yang berkaitan dengan penelitian mengenai dampak program bantuan pangan non tunai terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung
- 4) Untuk menambah ilmu dan informasi khususnya dalam program-program bantuan untuk rumah tangga miskin yang diberikan oleh pemerintah.